



P-ISSN: 2774-7999 E-ISSN: 2774-8723
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/eltarikh/index>
DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/jhcc.v5i2.21469>

Pemikiran Muhammad Natsir dalam Pembentukan Dasar Negara di Kontituante Tahun 1956-1959

Muhammad Natsir's Thoughts on the Formation of the Basis of the State in the Constituent Assembly in 1956-1959

Uswatun Hasanah¹, Siti Mufarohah^{2*}

^{1,2}, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

* Correspondence: sitimufarohah@gmail.com

Submit: 07 March 2024 Revised: 05 November 2024 Accepted: 28 November 2024 Published: 30 November 2024

Abstract

The research on Muhammad Natsir aims to explore the struggle of religious nationalist figures in Indonesia after gaining independence through the plenary session of the Constituent Assembly in 1956-1959. With a historical research method that uses four stages of methods, namely: Heuristic, Verification, Interpretation and Historiography. Muhammad Natsir's thinking is not only about religious issues but also about education, and politics. It is interesting to study the growth of Natsir's thoughts which are influenced by several factors that form his thinking framework, namely environmental factors in the land of Minang to the land of Sunda. As well as his encounters with religious leaders and nationalist figures. Among these figures is Ahmad Hassan from Masyumi. The tracking footprint that shaped Natsir's thinking had an impact on the Indonesian nation, such as the initiation of the Integral Motion and the construction of Islamic Educational Institutions based on the principle of balance of knowledge. Natsir's Thinking Pattern is Cosmopolitan Islam and modernity. The influence of his education, namely the combination of Dutch education and religion, meetings with educated people in Bandung, and the religious environment of Minang

Keywords: Muhamad Natsir, biography, Thoughts, Education

Abstrak

Penelitian mengenai Muhammad Natsir bertujuan untuk menggali perjuangan tokoh yang beraliran nasionalis agamis pada masa Indonesia setelah meraih kemerdekaan melalui sidang pleno Konstituante tahun 1956-1959. Dengan metode penelitian sejarah yang menggunakan empat tahapan metode yaitu: Heuristik, Verifikasi, interpretasi dan historiografi. Pemikiran Muhammad Natsir tidak hanya seputar pada persoalan agama tetapi juga tentang pendidikan, dan politik. Hal tersebut menarik untuk dikaji tumbuhnya pemikiran-pemikiran Natsir yang dipengaruhi oleh beberapa factor yang membentuk kerangka berfikirnya, yaitu factor lingkungan di tanah minang hingga tanah Sunda. Serta perjumpaannya dengan tokoh agama dan tokoh nasionalis. Di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Ahmad Hassan dari Masyumi. Jejak tracking yang membentuk pemikiran Natsir tersebut membawa dampak bagi bangsa Indonesia, seperti pencetusan Mosi Integral dan pembangunan Lembaga Pendidikan islam berdasarkan prinsip keseimbangan ilmu. Pola Pemikiran Natsir adalah Islam Kosmopolit dan modernitas. Pengaruh pendidikan yang ia tempuh, yaitu paduan pendidikan Belanda dan agama, pertemuan dengan orang-orang terpelajar di bandung, dan lingkungan minang yang kental agama

Kata Kunci: Muhamad Natsir, biografi, Pemikiran, Pendidikan



PENDAHULUAN

Siapa yang tidak mengenal Mohammad Natsir, selain tokoh nasional dan Ulama pembaru Islam. Ia banyak memiliki andil bagi kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan menduduki beberapa jabatan penting, seperti Anggota Badan pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP), menteri penerangan tahun 1946-1948, anggota DPR RIS dan Perdana Menteri tahun 1950-1951 (Setyaningsih, 2016: 75)

ketika menjelang proklamasi kemerdekaan, Indonesia berada pada persoalan apakah yang akan menjadi dasar negara bagi bangsa Indonesia yang baru saja lahir dan berdiri sebagai negara baru. Dalam situasi ini, banyak pemimpin rakyat, tokoh-tokoh, dan golongan yang secara representatif mewakili bangsa membentuk kontitusi baru, termasuk Mohammad Natsir yang turut terlibat di dalamnya.

Secara historis, persoalan tentang pembentukan dasar negara selalu dibenturkan dengan urusan agama. masalah tersebut diawali oleh artikel yang ditulis oleh Martoharsono dan Djodjodikromo, mengatakan "Nabi adalah seorang pemabuk dan penghisap candu". Artikel tersebut terbit pada tahun 1918 di Solo. Dan mendapat respon dari kelompok Islam yang dipelopori oleh Sarekat Islam, meminta pemerintah Hindia Belanda untuk bersikap tegas terhadap penulis artikel tersebut. Sikap SI mendapat respon balik dari kelompok nasionalis yang terbentuk dalam Nasionalis Jawa (Committee vor Het javansche Nationalisme). Dengan seruan untuk tidak mencampurkan urusan agama dengan urusan politik (Bismar Arianto, 2012).

Diawal tahun 1990-an perdebatan tentang permasalahan muncul kembali ketika Ir. Sukarno menulis artikel tentang "Apa sebab Turki memisahkan Agama dari Negara" pada Pandji Islam, yang kemudian di repon oleh Muhammad Natsir . Terlebih pada saat persiapan negara perdebatan masalah agama dan negara semakin memanas. Terdapat dua kubu bersebrangan pada badan BPUPKI. Kubu Islam berupaya mendirikan negara Islam dan Islam sebagai dasar negara. Sedangkan kubu nasionalis bersikukuh Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya pada era revolusi, Kubu Islam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara melalui sendi-sendi politik (partai). Dengan Masyumi yang berdiri 7 november 1945, Partai Syarikat Islam Indonesia (1947), Partai Tarbiyah Indonesia (Perti), Nahdlatul Ulama (keluar dari Masyumi 1952). Persolan tentang agama dan negara tidak berlanjut dengan berdirinya DI/TII yang diprakarsai oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agusrts 1949 di Jawa Barat, yang berusaha memisahkan diri dari Indonesia. Gerakan ini tersebar di Jawa tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Sulawesi Selatan, Aceh, juga berpengaruh di Kepulauan Nusa Tenggara, Ma;uku dan Halmahera (Ahmad Suhelmi, 2014).

Agenda pokok pasca proklamasi kemerdekaan adalah menyelenggarakan pemilihan umum untuk membentuk badan perwakilan dan badan konstituante yang akan menetapkan bentuk negara apakah federal atau kesatuan. Dan Perdebatan mengenai bentuk negara dan dasar negara tersebut telah mencuat sejak sidang BPUPKI, yaitu badan yang dibentuk pemerintah militer Jepang. Anggotanya terdiri dari beberapa tokoh yang terkemuka di Jawa. Seluruh kegiatan BPUPKI harus dilaporkan kepada Jepang. Lalu kemudian Konstituante, yang menggambarkan pertarungan antara Pancasila dengan Islam.

Dari hasil pemilihan umum untuk menentukan anggota Konstituante berlangsung pada 15 Desember 1955, didapatkan 514 anggota yang terdiri dari aliran, golongan dan partai politik. Adapun wakil dari golongan minoritas Tionghoa berjumlah 12 orang, Indo-Eropa berjumlah 12 orang dan wakil Irian Barat berjumlah 6 orang (Rahmad Ardiansyah. 2016)

Jika dipetakan mengenai perdebatan dasar negara yang berlangsung dari tanggal 11 November hingga Desember 1957 terdapat tiga blok kuat, yaitu; Pancasila, Islam dan Sosial-Ekonomi. Ini menjadi hal penting untuk dipertanyakan. Mengapa soal perdebatan tentang dasar negara ini menjadi hal penting dan tidak kunjung usai? Ini menandakan bahwa negara mayoritas muslim di Inonesia masih belum menerima bahkan menolak terhadap bentuk negara sekuler. Maka diharapkan Kontituante dapat melahirkan konstitusi baru dan titik final dasar negara bagi bangsa Indonesia.

Pemikiran Muhammad Natsir dalam Pembentukan Dasar Negara di Kontituante Tahun 1956-1959

Muhammad Natsir, hadir dan terlibat dalam polemik tentang Islam dan negara dan menjadi bagian dari golongan Islam. Natsir adalah salah satu tokoh yang mewakili partai Masyumi menginginkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Namun Natsir memiliki cara dan sikap yang berusaha menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran Natsir tentang konsep negara Islam tidaklah sama dengan pemikiran tokoh Islam seperti Kartosuwirjo yang ingin mendirikan negara baru yakni negara Islam. Hal tersebut sangat tidak mungkin karena negara tidak akan bisa berdiri di atas negara. Yang lebih diperlukan masa itu adalah bentuk atau dasar negaranya bukan membentuk negara baru.

Muhammad Natsir selaku tokoh yang mewakili Masyumi bersama tokoh-tokoh Islam lainnya yang berasal dari PSII, NU, dan Persis menginginkan Islam sebagai dasar negara. Menurut Natsir, “paham sekulerisme itu sangat berbahaya karena dapat menurunkan sumber nilai-nilai hidup manusia dari taraf ke-Tuhanan kepada taraf kemasyarakatan semata-mata”. Maksudnya nilai-nilai adab dan kepercayaan pada tingkat perbuatan manusia akan menjadikan pandangan manusia terhadap nilai-nilai tersebut akan merosot, karena lambat laun manusia akan merasa lebih tinggi dari nilai-nilai tersebut. Maka dari latar belakang tersebut, penelitian ini perlu merumuskan beberapa masalah. Pertama, bagaimana biografi Muhammad Natsir?, bagaimana tumbuhnya ideologi Mohammad Natsir?, dan bagaimana pemikiran-pemikiran Muhammad Natsir dalam sidang konstituante? Untuk menjawab rumusan masalah maka penulis menggunakan sumber primer karya Natsir, dengan judul Islam Sebagai dasar negara, Pidato Moh. Natsir dalam Sidang Pleno Konstituante yang terdapat dalam buku tentang Konstitusi Republik Indonesia tahun 1958 yang berjudul “Tentang Dasar Negara jilid I dan jilid III”.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah yang terdiri atas empat tahapan utama. Tahap pertama adalah heuristik, yaitu pengumpulan data dengan melakukan kajian terhadap sumber tertulis seperti buku dan jurnal yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan tokoh Muhammad Natsir. Penulis memanfaatkan sumber primer, seperti buku *Capita Selecta I* dan *Capita Selecta II* karya M. Natsir, yang berisi kumpulan pidato yang direkam dalam bentuk tulisan. Sebagai pendukung, digunakan pula sumber-sumber tambahan berupa buku lain, artikel dari internet, dan e-book, sehingga penelitian ini berbasis pustaka (*library research*). Tahap kedua adalah verifikasi atau kritik sumber, yang melibatkan proses kritik eksternal dan internal untuk menguji keabsahan serta kredibilitas sumber yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga adalah interpretasi, di mana peneliti menganalisis dan memahami data yang telah diverifikasi, termasuk informasi mengenai biografi Muhammad Natsir, kehidupannya di tanah Minang hingga Bandung, serta peran aktifnya dalam sidang konstituante. Data-data tersebut disusun dan ditafsirkan secara kronologis. Tahap terakhir adalah historiografi yaitu penulisan sejarah berdasarkan fakta-fakta yang telah diperoleh melalui analisis kritis. Menurut Helius Sjamsuddin (2007), metode sejarah adalah proses penelitian yang mencakup pengkajian, penjelasan, dan analisis kritis terhadap peristiwa masa lampau, yang kemudian diakhiri dengan penulisan sejarah. Kuntowijoyo (2003) juga menegaskan bahwa tahapan-tahapan dalam metode sejarah ini penting untuk memastikan hasil penelitian yang sistematis dan valid.

PEMBAHASAN

Biografi Muhammad Natsir

Sumatera Barat menjadi salah satu tempat yang melahirkan banyak tokoh Nasional, dan mayoritas dari mereka memiliki dasar keagamaan yang baik, begitupun Muhammad Natsir, seorang tokoh yang selama hidupnya telah banyak memberikan gagasan dan bukti nyata mengenai pendidikan, keagamaan, dan politik. Beliau lahir di tanah minang, pada tanggal 17 Juli 1908 di Alahan Panjang, Sumatera Barat. Beliau bukanlah seorang yang tumbuh dalam suasana keluarga bangsawan, ayahnya Muhammad Idris Saripadu merupakan seorang Juru Tulis yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda di daerah kelahirannya. Hal ini membuat

Natsir harus menjalani pendidikan yang sesuai dengan kasta orang tuanya, namun hal tersebut akhirnya dapat ia atasi dengan kecerdasannya. Muhammad Natsir menjalani pendidikan formal di beberapa tempat, yaitu HIS (Holland Inlander School), kemudian berlanjut ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), dan AMS (Algemene Middle Bare School) (Syahminan, 2016).

Masa pendidikan di HIS, beliau jalani di Sumatera Barat. Kemudian ketika masuk ke MULO beliau berpindah ke Bandung, hingga melanjutkan ke AMS. Keputusan Natsir untuk hijrah ke Bandung dengan tujuan untuk menuntut ilmu menjadi penentu terbentuknya pemikiran-pemikirannya. Tentang kosep Negara dalam islam, tentang pendidikan, dan juga tentang dakwah. Dimulai ketika beliau berada di tanah pasundan, awalnya tertarik pada dunia hukum lalu beralih menjadi seorang yang giat dalam hal keagamaan. Hal tersebut dipengaruhi oleh pertemuannya dengan tokoh-tokoh di Bandung beberapa diantaranya adalah A. Hassan, Agus Salim. Dan Ahmad Sjookarti tokoh agama yang tergabung dalam Persis (Persatuan Islam).

Muhammad Natsir berhasil mendapatkan beasiswa Hukum di Universitas Leiden, tapi ketika beasiswa itu beliu dapat, justru beliau mulai mengalihkan ketertarikannya pada bidang keagamaan. Hal ini tentu bukan tanpa sebab, latar belakang beliau yang berasal dari Sumatera Barat dengan tradisi surau sebagai tempat pendidikan agama yang kuat menjadi salah satu faktor beliau mendalami agama. Meski tidak menjadi bagian dari Persis tapi jejak pemikiran Muhammad Natsir tergambar dalam konsep pendidikan Islam dalam tubuh Persis. Ia juga banyak menulis tentang pemikiran Islam. Yang aktif ia tulis di majalah-majalah Islam dengan karya pertamanya diterbitkan tahun 1929. Terdapat sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis Natsir. Prestasi gemilang juga ia dapatkan dengan dianugerahi gelar Doktor honoris causa, satu dari Lebanon dan dua dari malaysia. Pada tanggal 10 November 2008, Natsir juga dianugerahi sebagai Pahlawan nasional Indonesia. bahkan Natsir juga dikenal sebagai mentari yang “tak punya baju bagus, jasanya bertambal. Dia diketahui juga sebagai Menteri yang tidak memiliki rumah dan menolak diberi mobil mewah.

Kehidupan karir Muhammad Natsir juga diawali dengan hubungan relasinya dengan para tokoh-tokoh ideologi. Seperti Agus Salim, yang ia kenal sejak tahun 1930-an, dengan Salim, ia sering berdiskusi dan bertukar pikiran. Baik tentang Islam maupun tentang pemerintahan yang saat itu dipimpin oleh Sukarno. Kemudian Natsir bergabung dengan partai Islam, Indonesia dan diangkat sebagai pemimpin untuk cabang Bandung dari tahun 1940-1942 (Hakim, 2017). Ia katif sebagai kepala biro pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Ketika masa pendudukan Jepang ia juga terlibat dalam Majelkis Islam A'la Indonesia yang kemudian berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia dari tahun 1945 (Delier, 2003).

Pasca kemerdekaan, nastir menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Sebelum menjadi perdana menteri ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada tanggal 3 April 1950, Natsir mengajukan mosi integral dalam sidang pleno parlemen, Mosi ini bertujua untuk memulihkan keutuhan bangsa Indonesia yang sebelumnya terbentuk Serikat. Hal inilah yang menjadikan Natsir kemudian diangkat sebagai Perdana Menteri. Namun Natsir mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena berselisih paham dengan Sukarno.



Gambar. Muhammad Natsir (1948)

Sumber https://id.wikipedia.org/wiki/Mohammad_Natsir#/media/Berkas:Natsir_1948.jpg

Tumbuhnya Ideologi Muhammad Natsir (Politik, Pendidikan, dan Dakwah).

Muhammad Natsir bertumbuh di masa pergolakan politik dan perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan yang berdaulat dan bebas jajahan. Kondisi ini mempertemukan Muhammad Natsir dengan politik. Kekagumannya dengan tokoh-tokoh nasionalis yang aktif melakukan diskusi tentang pendirian Negara, membuat beliau mengagumi tokoh-tokoh nasionalis termasuk Ir. Sukarno. Ia tertarik menyaksikan rapat-rapat terbuka yang diselenggarakan oleh PNI. Namun kekagumannya tersekat oleh perbedaan visi dan gagasan kaum nasionalis yang dianggap sekuler. sementara Natsir adalah 'orang kanan' yang tidak sejalan dengan pemikiran itu. Ia sering mendengar kaum nasionalis ini berdiskusi tentang sesuatu hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

Dengan kegelisahannya, Muhammad Natsir mulai menulis 'serangan balik' kepada kaum Nasionalis dalam majalah-majalah yang ia bentuk bersama rekan-rekannya. Tak tinggal diam, kaum Nasionalis yang merasa tersinggung, yang salah satunya adalah Bung Karno, membalas kembali melalui tulisan, yang salah satunya mungkin populer dengan judul "Islam Sontoloyo". Konflik gagasan ini menjadi bukti bahwa orang-orang terpelajar tidak akan bertarung bahasa fisik tetapi dengan bahasa lisan dan tulisan melalui media penerbit. Muhammad Natsir dan Ir. Sukarno saling bersebrangan dalam ranah ide, namun keduanya tak punya masalah secara personal, bahkan keduanya saling bekerjasama di awal-awal pembentukan NKRI, seiring dengan diangkatnya Muhammad Natsir sebagai Menteri Penerangan di dalam kabinet pemerintahan Ir. Sukarno.

Muhammad Natsir, sebagai sosok yang memiliki banyak gagasan baik dalam hal Politik, Keagamaan, maupun pendidikan, tentu tidak serta merta hadir begitu saja, pemikiran-pemikiran beliau dalam bidang politik islam banyak di ilhami dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam diri beliau. Sebagai seorang yang telah menimba ilmu agama sejak dini hingga pendidikannya di Bnadung turut menjadi sebab munculnya gagasan Muhammad Natsir tentang politik islam dan Negara Islam. Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) menjadi wadah yang menghantarkan Muhammad Natsir dalam kiprah politiknya. beliau juga tergabung dalam KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat). keaktifannya menjadi Jurnalis di Majalah Pembela Islam juga mempengaruhi berkembang pemikiran politik Muhammad Natsir (Dimas dan Ajat, 2020).

Pemikiran Muhammad Natsir tentang pendidikan juga muncul dari pertanyaan atas ketiadaan lembaga pendidikan yang seimbang, antara ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu barat (umum). Masalah tersebut membuat beliau membentuk lembaga pendidikan islam. Pemikiran itu juga tumbuh dari proses diskusi-diskusi yang sering beliau lakukan dengan tokoh-tokoh persis. Pemikiran Muhammad Natsir memang banyak tercipta pada masa-masa pergaulannya dengna tokoh-tokoh tersebut. Seperti A. Hassan yang juga aktif menulis di majalah-majalah dan surat kabar dengan muatan politik.

Tumbuh di lingkungan yang tak pernah berhenti membuatnya berfikir mampu membentuk karakter kuat pada Muhammad, sikapnya yang religious namun tetap modernis membuat beliau dengan mudah menyesuaikan perkara-perkara atau issue baru, dia bukan tokoh agama yang kaku, tapi juga bukan tokoh politik yang liberal. pemikirannya nya selalu bertumbuh sesuai dengan syariat-syariat agama islam.

Muhammad Natsir yang berorientasi religi, memiliki prespektif sendiri mengenai apa itu Negara. Baginnya Negara adalah alat, tujuan utama berdirinya sebuah Negara adalah sebagai alat yang dapat dipergunakan untuk menjamin agar aturan-aturan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits dapat terjalin dengan baik. Menurut Muhammad Natsir dalam agama islam, terutama dalam Al Qur'an segala hal tentang kehidupan memang telah ada dan jelas di terangkan dalam Al-Qur'an. Muhammad Natsir dalam sebuah kesempatan nya berpidato

pernah berkata bahwa Seringkali orang mengartikan bahwa yang dinamakan agama itu hanyalah semata-mata satu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Definisi ini mungkin tepat bagi bermacam-macam agama. Akan tetapi tidak tepat bagi agama yang bernama Islam, yang hakikatnya nyata lebih dari itu. Beliau mengutip perkataan salah seorang tokoh orientalis yang berkata bahwa "*islam is much more than a religious system, it's a complete civilization*" atau islam bukan hanya berupa sistem peribadatan keagamaan tapi juga suatu kebudayaan yang sempurna (Hafnita dan Ihsan, 2022).

Muhammad Natsir juga menilai bahwa Islam yang dijadikan sebagai basis dalam kehidupan bernegara memiliki banyak kelebihan. Kelebihan tersebut antara lain adalah Islam memberikan kemungkinan lebih banyak kepada pemeluknya untuk mencari ilmu dan kebenaran, filsafat sekuler hanya mengakui tiga dasar berpikir, empirisme, rasionalisme, dan intuisiisme, sedangkan wahyu tidak diakuinya. Kelebihan lainnya adalah Jangkauan agama Islam yang meliputi seluruh aspek kehidupan (Voet, 2010). Meskipun Muhammad Natsir menghendaki adanya Negara Islam, namun pergerakan beliau tidak dengan cara separatistis dan bersenjata, sebagaimana yang dilakukan oleh Kartosuwirjo. Darul Islam milik Kartosuwirjo memang menjadi salah satu yang di harapkan oleh Natsir, tapi cara yang ditempuh bertentangan dengan dirinya. Meski demikian Muhammad Natsir memiliki hubungan yang baik dengan Kartosuwirjo, tergambar ketika beberapa kali Bung Hatta meminta bantuan Beliau untuk melakukan negosiasi dengan Kartosuwirjo yang kala itu sedang gencar melancarkan niatnya berpisah dari Indonesia dan mendirikan Negara islam.

Muhammad Natsir juga memiliki pandangan sendiri mengenai Pancasila, sebagaimana susunan pancasila yang meski telah berubah dari model piagam Jakarta yang sebelumnya dengan jelas mencantumkan aspek-aspek Islam, namun keberadaan sila pertama yang kokoh menjunjung ketuhanan sebagai hal yang ada paling pertama, membuat Natsir dapat menerima Pancasila dengan baik, karena walau dasar-dasar Negara dengan syariat Islam yang beliau kehendaki tidak dapat terlaksana, kiranya aspek "*ketuhanan*" itu bisa mewakili status NKRI yang bukan bagian dari Komunis. Dan bagi Beliau keseluruhan sila Pancasila tidaklah bersebrangan dengan kaidah-kaidah dalam islam (Sukri, 2019).

Selain tentang bentuk Negara Islam dan dasar Negara, Muhammad Natsir juga memiliki gagasan yang diwujudkan dalam Mosi Integral, sebuah mosi yang harus segera dilakukan mengingat ditahun tersebut yaitu pada tahun 1950, Indonesia yang berbentuk Republik Serikat terdesak dengan Negara-negara bagian yang ingin berdiri sendiri. Mosi ini berisi tentang upaya untuk menyatukan Negara-negara bagian dalam satu Republik Indonesia mewujudkan Negara yang berintegritas dan bersatu dalam kesatuan bukan dalam bentuk serikat yang terpecah-pecah, Mosi integral ini disampaikan oleh Natsir pada tanggal 3 April 1950. saat itu Natsir sudah menjadi ketua umum Masyumi.

Keberhasilan Natsir dalam mengemukakan dan menjalankan Mosi Integral membuatnya disanjung oleh Bung Karno, Beliau juga masuk dalam dewan formatur yang menghasilkan kabinet Muhammad Natsir, meski pada perjalanannya beliau harus bersebrangan ide 'lagi' dengan Bung Karno. Hal ini berkaitan dengan Demokrasi Terpimpin yang dijalankan oleh Ir. sukarno, yang tak sejalan dengan Natsir, dan hal ini membuat Natsir masuk dalam kelompok yang menentang Demokrasi Terpimpin bersama PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia)(Pangestu dan Sudrajat, 2016).

Meski pada akhirnya Muhammad Natsir harus keluar dari dunia politiknya, dengan menyadari politik bangsa Indonesia sudah ditumbuhi oleh paham sekuler yang kuat, kecondongan pemimpin Negara dengan Partai Komunis juga memprihatinkan bagi Natsir yang berjuang di sayap "kanan". Kenyataan sudah bersebrangan dengan prinsip dan nilai-nilai yang selalu di gaungkan oleh Natsir, maka beliau memilih untuk keluar dari lingkaran politik. Sempat bergabung dalam perlawanan yang dilakukan oleh PRRI, namun Muhammad Natsir melanjutkan jalan Dakwah nya. Jika sebelumnya Politik dijadikan alat untuk berdakwah, kali ini Dakwah lah yang menjadi jalannya untuk berpolitik. Beliau dan beberapa ulama lain

Pemikiran Muhammad Natsir dalam Pembentukan Dasar Negara di Kontituante Tahun 1956-1959

mendirikan lembaga dakwah dengan nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada tahun 1967 (Syahmimam, 2020).

Gagasan-gagasan Muhammad Natsir dalam bidang pendidikan banyak mengambil dari konsep Islam dari timur tengah. Dalam Islam dikenal tiga istilah pendidikan; *Al Tarbiyah, Al Ta'lim, dan Al Ta'dib*. Natsir mengambil Al Tarbiyah sebagai konsep yang mengilhaminya dalam pemikiran mengenai pendidikan. Al tarbiyah sebagai satu konsep yang tidak hanya berkuat pada aqidah, tapi juga mencakup kehidupan manusia secara utuh, sesuai dengan pemikirannya yang menghendaki keseimbangan dalam pendidikan. Alasan lain mengapa Muhammad Natsir merasa cocok dengan konsep Tarbiyah adalah, *pertama* karena dalam Tarbiyah mencakup pembinaan dan pengembangan Ilmu pengetahuan yang menekankan pada aspek akhlak. *Kedua*, karena didalamnya terdapat pembinaan terhadap jiwa untuk mencapai kesempurnaan Ilmu Pengetahuan. Muhammad Natsir menghendaki pendidikan harus berifat universal, harmonis, dan integral yang berdasarkan pada tauhid. Beliau berpendapat bahwa pendidikan Islam setidaknya harus memenuhi empat konsep dasar, yaitu:

- a. Kegiatan pendidikan harus memiliki target, tujuan, dan sasaran.
- b. Pendidik sejati adalah Allah SWT, karena Allah lah sang pencipta fitrah, dan bakat dengan segala kesempurnaannya.
- c. Pendidikan menuntut terwujudnya program berjenjang, peningkatan kegiatan dan pengajaran selaras dengan urutan juga sistematika menanjak yang membawa anak didik dari suatu perkembangan ke perkembangan lainnya. Peran seorang pendidik harus sesuai dengan tujuan Allah swt. menciptakannya. Artinya pendidik harus mampu mengikuti syariat agama Allah (Munawir, 2019).

Bagi Muhammad Natsir pendidikan adalah satu aspek penting bagi kemajuan bangsa, pendidikan yang baik akan menghasilkan SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas pula, maka ia gencar menggagas pembaharuan dalam konsep pendidikan. Di masa mudanya ketika sekolah Hukum menjadi sebuah fasilitas langka harus ia tolak karena selain ketertarikannya pada keagamaan, ia juga mulai tertarik untuk memajukan pendidikan.

Keresahan Natsir terhadap model pendidikan yang selalu tidak seimbang, akhirnya melahirkan konsep pendidikan Islam yang tetap mengandung ilmu pengetahuan umum. Ia menghendaki adanya keseimbangan diantara keduanya. Kebanyakan dari mereka sebelumnya hanya berorientasi pada ilmu-ilmu keagamaan sehingga dinilai kurang bisa menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Disamping itu model pendidikan yang ditawarkan di sekolah-sekolah buatan Belanda tak tersentuh oleh nilai-nilai agama yang menjauhkan umat dari religiusitas. Hal ini bisa menunjukkan bahwa konsep pendidikan pesantren modern di masa kini terilhami dari model yang di bawa oleh Natsir. Karena di Persis, model pesantren yang juga mempelajari keilmuan barat terinspirasi oleh gagasan Muhammad Natsir.

Pemikiran Muhammad Natsir dalam pidato Konstituante Tentang Dasar Negara

Sebelum menyampaikannya intinya pemikirannya tentang dasar negara, terlebih Natsir menyampaikan kepada ketua sidang Wilopo dengan lebih dulu menyatakan penghargaan kepada seluruh Panitia Persiapan Konstitusi yang telah melaksanakan tugasnya, menjelajah serta merumuskan pikiran-pikiran yang hidup dalam berbagai aliran dalam konstituante ini. Yaitu mengenai pokok dasar negara, yang hendak dibahas secara bersama-sama. Lebih lanjut Natsir menyampaikan:

“ saudara Ketua, kemarin dulu, diwaktu kita memperingati hari pelantikan Konstituante, Saudara ketua konstituante, Saudara Wilopo menerangkan antara lain, bahwa adalah fungsi dari Konstituante ini untuk menjusun konstitusi yang defenitif pengganti Undang-Undang dasar Sementara kita yang bersifat sementara. Demikian saudara Wilopo. Fungsi ini Saudara Ketua, hanya dapat dipenuhinja, apabila ia mendapat kesempatan yang seluas-luasnja untuk menjelajah, membahas, mebanding pikiran-pikiran yang hidup dalam masyarakat Indonesia. tegasnja melakukan orientasi yang sungguh-sungguh, agar hasil yang

hendak ditjiptakan itu nanti benar-benar dapat dipertanggung-djawabkan bagi rakyat dan keturunan kita dimasa datang”.(KRI. 1958a: 109)

Dasar-dasar pemikiran Natsir tentang pendidikan, agama dan politik kemudian berakumulasi. Menyatu, membaaur membentuk satu sintesis baru tentang ideologi negara. Dan dasar ideology kenegaraan bagi Natsir ialah islam, hal itu ia yakini karena sebagai seorang muslim. Dalam ajaran islam telah diatur semua hal, tentang kehidupan manusia di dunia hingga akhirat. Maka ia menolak paham sekuler dalam pengelolaan negara. Hal tersebut dapat dilihat pada pidato natsir pada tanggal 12 November 1957, sebagai berikut:

“sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap, hanya didalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam penghidupan kaum sekularisme tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal ada: akhirat, tuhan dsb. Walaupun ada kalanya mereka mengakui akan adanya tuhan, tapi dalam penghidupan perseoangan sehari-hari umpamanya, seorang sekularis tidak menganggap perlu adanya hubungan jiwa dengan tuhan, baik dalam sikap, tingkah laku dan tindakan sehari-hari, maupun hubungan jiwa dalam arti do’a dan ibadah (Natsir, 1957).

Ungkapan yang menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap sekuler dengan memunculkan kelebihan agama Islam dalam mengelola negara. Yaitu:

“pertama, agama memberikan kepada pemeluknya lebih banyak kemungkinan untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan kebenaran. Segala falsafah yang sekuler mengakui tiga dasar berfikir yaitu empirisme (mazhabul-tadribah), rationalism (mazhabul-aqly) dan insuitionisme (mazhabul-ilhami). Dasar wahyu, relevatio ataupun open baring tidak diakuinya. Agama lebih dari pada itu. Ia mengakui semuanya itu dan memberikan ketentuan yang tegas dimana daerah semuanya itu memberikan ketentuan yang tegas dimana daerah berlakunya masing-masing. Oleh karena itu agama lebih luas dan lebih. dalam dibandingkan dengan paham sekuler. Kedua, paham agama meliputi seluruh kehidupan manusia (Arianto, 2018).

Muhammad Natsir juga mengatakan bahwa negara adalah Institusion. Yang berarti suatu badan, organisasi, jang mempunyai tujuan khusus serta dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri, dan diakui oleh umum. Dalam masyarakat terdapat macam-macam institution. Sebagai institution pelajaran-pelajaran, ekonomi, agama, politik, seni, famili, pergaulan, dagang, dan sebagainya. Jadi institution ini adalah rangkaian hidup dalam rangka badan hidup yang besar. Namun dalam intitution memiliki keanggotaan dan memiliki kedaulatan atas anggotanya (KRI.1958a :112)

Apabila pihak Islam menolak ajakan terhadap Pancasila tersebut dengan alasan yang dipakai orang menolak paham hidupnya, seringkali mudah pula bagi orang menuduhnya bahwa mereka tidak mau bersatu. Maka dalam hal ini Natsir merasa khawatir apabila menegakkan Pancasila sebagai titik pertemuan itu, bukan sekedar prinsip demokrasi semata yang dikorbankan, akan tetapi mesti dikesampingkan juga salah satu paham hidup dari satu golongan yang terbesar di Indonesia ini, yakni paham hidup yang mengatur bukan saja hubungan manusia dengan tuhannya, tapi juga mengatur hidup bermasyarakat dan bernegara.

Lebih jauh Natsir berpendapat tiap-tiap ideologi bukan suatu rangkaian pikiran atau ide-ide saja, tetapi juga merupakan suatu perpaduan antara ide dan aliran-perasaan dengan gelombang-gelombang tertentu (Thought and attitude) yakni unsur pemikiran (fikrab) atau pendapat dan unsur sikap jiwa (‘aqidah) yang menyertainya (Dasar negara: 115-116). Maka pandangan Natsir Islam sebagai dasar negara yang paling ideal bagi bangsa Indonesia adalah bukan karena alasan jumlah umat Islam merupakan jumlah terbanyak

di Indonesia. akan tetapi lebih kepada ajaran-ajaran islam telah mempunyai sifat-sifat yang sempurna bagi kehidupan negara dan masyarakat. Serta dapat menjamin hidup keberagaman atas saling harga-menghargai antara berbagai golongan di dalam negara. (KRI.1958a: 116)

Pada pidato kedua di Konstituante Mohammad Natsir menyampaikan pemikirannya dengan konsisten tentang Islam sebagai dasar negara. Bahwa di dalam Konstituante ketika hendak menentukan dasar negara tentunya harus menempuh atau mengambil jalan dari sumber wahyu Illahi, terutama bagi orang-orang yang beragama dan percaya kepada wahyu Illahi, akan benar-benar merasakan tanggung jawab besar, terutama tanggung jawab kepada umat dan Tuhan. (KRI. 1958c: 442)

Alasan natsir dalam pembentukan negara berlandaskan Islam karena; *pertama*, Natsir melihat jumlah muslim di Indonesia yang mendominasi, maka nilai-nilai Islam telah tumbuh pada masyarakat Indonesia. *Kedua*, Islam mengatur tentang unsur muamalah (pola kehidupan seseorang, kekeluargaan, dan bernegara) (Bismar, 2018).

Ia menolak pemikiran Sukarno tentang memaknai negara Islam layaknya Kemal Attaturk yang memisahkan agama dan negara saat menjadi pemimpin di Turki pasca kekhalifahan Utsmaniyah berakhir. Ia juga berusaha meluruskan cara pandang para orientalis yang selalu mendiskritkan Islam mengenai konsep negara. Orientalis menempatkan Barat, serta kebudayaan, religi, dan bahasa lebih unggul dari pada Timur. Konteks Timur sendiri adalah bagian Jazirah Arab sebagai tempat lahirnya ajaran islam. Konsep orientalis ini cukup mempengaruhi mindset orang timur dalam memilih Islam sebagai dasar negara. Sebagai contoh adalah terkait dengan hukum cambuk, potong tangan bagi pencuri, maupun soal prinsip-prinsip poligami. Padahal Islam telah mengatur mekanisme dan penilaian dasar atas hal tersebut. Terlebih orientalis tidak menyinggung soal Islam yang solider, cinta kedamaian, adil, rahmatan lil'alam. Maka kegagalan dalam memahami negara Islam itulah yang menjadi penyebab kelompok nasionalis di Indonesia ragu dan takut dengan pilihan Muhammad Natsir tentang Negara Islam sebagai dasar negara.

Keunggulan-keunggulan Islam ia sampaikan pada sidang konstituante, namun upaya Natsir mengemas Islam dan negara maka ia menyatukan konsep itu dengan membentuk negara Republik yang masih berlandaskan Islam. Sebagaimana ia ungkapkan dalam sidang Konstituante dalam menentukan dasar negara “...*Supaya negara Republik Indonesia kata ini berdasarkan Islam. Negara demokrasi berdasarkan Islam*” (Natsir, 2004). Jadi, bentuk negara yang diajukan oleh Natsir berbentuk republic maka rakyat sendiri yang berhak memilih kepala negaranya. Maka kepala negara mendapat kekuasaan dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai dengan perintah dan ketentuan Allah dan rasulnya serta mampu menjamin kepentingan seluruh rakyat, hal ini dikemukakan juga oleh Natsir:

“Demokrasi dalam Islam memberikan hak kepada rakyat, supaya mengkritik, menegor, membetulkan pemerintahan yang lain, kalau tidak tjukup dengan krtik dan tegoran, Islam memberikan hak kepada rakyat untuk menghilangkan kezaliman itu dengan kekuatan dan kekerasan djikalau perlu”.

Dari ungkapan Natsir pada sidang pleno Konstituante menunjukkan bahwa pemikiran Natsir dalam konsep negara adalah mempertemukan Islam dan nasionalisme. Ini menjadi gagasan solutif ditengah-tengah ketegangan umat Islam, non-muslim dan kalangan nasionalis. Nyatanya Negara republic menjadi problem solving dari ketengahan bangsa Indonesia membentuk ideologinya.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa; pertama, pemikiran Muhammad Natsir tentang Negara, agama dan pendidikan merupakan pemikiran moderat dan lentur. Meskipun basis pemikirannya adalah Islam namun Natsir bukanlah tokoh yang kaku seperti Kartosuwirjo yang

ingin mendirikan Negara Islam secara mutlak. Tidak juga sekuler seperti tokoh-tokoh nasionalis. Sikapnya yang menerima Pancasila merupakan sikap yang menunjukkan beliau berusaha menyatukan paham nasionalis agamis. Keduanya ia anggap bisa menjadi pondasi kuat dalam pendirian negara. Ini tentu bersebrangan dengan pemikiran Sukarno tentang pemisahan antara Negara dan agama lewat tulisannya “Apa sebabnya turki memisahkan Agama dan negara”. Mengagumi pemerintahan sekularisme Kemal Pasya di Republik Turki. Kedua, Sikap mundur dari politik dan Fokusnya Natsir dalam bidang dakwah adalah sikap menghargai regulasi politik sekuler yang sudah berdiri kokoh. Namun Ia tetap mencari solusi bagi permasalahan bangsa Indonesia melalui sendi Pendidikan. Dari pendidikan inilah ia menemukan jalan merubah mindset generasi bangsa secara tidak radikal. *Ketiga*, Pola Pemikiran Natsir adalah Islam Kosmopolit dan modernitas. Ini jelas hasil sintesis dari pengaruh pendidikan yang ia tempuh, yaitu paduan pendidikan belanda dan agama, pertemuan dengan orang-orang terpelajar di Bandung, dan lingkungan minang yang kental agama. Maka ia mampu menyodorkan formulasi baru dalam pendidikan yang modernis yaitu perpaduan ilmu agama dan sains.

REFERENSI

- Alfahjri Sukri, Mhd. Islam dan Pancasila dalam Pemikiran M. Natsir. *Alfuad: Jurnal ilmiah sosial keagamaan*. Volume 3. Number 1. Juni 2019.
- Capita Selecta jilid II. Dihimpun oleh D.P. Sati Alimin. Jakarta: Pustaka Pendis. 1957.
- D. Aldi Pangestu. Ajat Sudrajat. Muhammad Natsir: Konsep Hubungan Antara Negara dan Islam dalam Mosi Integral Natsir. *Jurnal Review Politik Volume 10, Nomor 01, Juni 2020*.
- F. Sari Lubis. M. Ihsan Syahaf Nasution. Pengaruh Partai Politik Terhadap Konstruksi Pemikiran Muhammad Natsir. *Mukaddimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial*. VI. 06. Issue 01. Thn 2022.
- Hakim, Lukman. *Biografi mohammad Natsir: Kepribadian, Pemikiran dan Perjuangan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. <https://idsejarah.net/2016/02/pemilu-1955-dan-perdebatan-konstituante.html>
- Kamaluddin, Munawir. *Mohammad Natsir Rekonstruksi Terhadap Pemikirannya Tentang Pendidikan*. Edited by Abdul Wahid Haddade. Makassar: Pusaka Almaldal Makassar, 2019.
- Kamaludin, Munawir. *Mohammad Natsir: Rekonstruksi Terhadap Pemikirannya Tentang Pendidikan*. 2019. Makassar: Pusaka Almaldal Makassar.
- KRI. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Djilid I*. Bandung: Konstituante Republik Indonesia. (1958a)
- KRI. *Tentang Dasar Negara Republik Indonesia Dalam Konstituante Djilid III*. Bandung: Konstituante Republik Indonesia. (1958c)
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah* (Ed. 2). Tiara Wacana Yogya.
- Lubis, Hafnita Sari Dewi, and Muhammad Ihsan Syahaf Nasution. “Pengaruh Partai Politik Terhadap Konstruksi Pemikiran M. Natsir.” *MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, Dan Ilmu-Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2022): 46. <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i1.5027>.
- Mhd, Syahmian. *Pemikiran Politik Muhammad Natsir: Analisis dan Interpretasi Politik Islam Masa Orde Lama dan Awal Orde Baru*. Medan: Fakultas Ushuludin IAIN Sumatera. 2012.
- Natsir: Politik Santun di antara Dua Rezim. Seri Buku TEMPO: Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Noer, Delier. Jaap Erkelens, ed. *Mohammad Hatta: Hati Nurani Bangsa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Pangestu, Dimas Aldi, and Ajat Sudrajat. “Mohammad Natsir: Konsep Hubungan Antara Negara Dan Islam Dalam Mosi Integral Natsir.” *JRP (Jurnal Review Politik)* 10, no. 1 (2020): 76–77. <https://doi.org/10.15642/jrp.2020.10.1.69-87>.
- Sukri, Alfahjri. “Negara Dalam Pemikiran Mohammad Natsir.” *Jurnal Al-Aqidah* 11, no. 2 (2019): 118–31. <https://doi.org/10.15548/ja.v11i2.1416>.

Pemikiran Muhammad Natsir dalam Pembentukan Dasar Negara di Kontituante
Tahun 1956-1959

Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Penerbit Ombak.

Syahminan, Mhd. *Pemikiran Politik Muhammad Natsir Analisis Dan Interpretasi Politik Islam Masa Orde Lama Dan Awal Orde Baru*, 2016.

Setyaningsih, Emi. Perjuangan dan Pemikiran Politik Mohammad natsir. 1907-1993. *Jurnal Tapis*, 12 (2). 73-75, from: <https://doi.org/10.24042/tps.v12i2.824>.

Tempo, Tim Penulis. "Natsir: Politik Santun Di Antara Dua Rezim," no. July (2020): 1-23. (AgustianTomi, *Demokrasi Islam dalam Pandangan M. Natsir 2020*)

Tomi Agustian. *Demokrasi Islam dalam Pandangan Muhammad Natsir dan Muhammad Abid Al Jabiri. Jurnal El Ghirah. Vol. XVIII, No. 01. Februari 2020.*

Voet, D. M. "Capita Selecta." *Infectiepreventie van A Tot Z*, 2011, 171-97. https://doi.org/10.1007/978-90-313-8743-4_6.

<https://idsejarah.net/2016/02/pemilu-1955-dan-perdebatan-konstituante.html>